KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI MALUKU
Jl. Pitu Ina Karang Panjang No.7 Karang Panjang Ambon 97134 Kotak Pos 1199
Telepon (0911)354428, 354430, 354434, Fax (0911) 314757
***e-mail* : csw.maluku@kemenkeu.go.id**

Nomor : S- 1022 /WPB.32/2018 9 Agustus 2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2018 Provinsi Maluku

Yth Direktur Jenderal Perbendaharaan
c.q Direktur Pelaksanaan Anggaran
di Jakarta

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Maluku telah melakukan penyusunan Kajian Fiskal Regional Provinsi Maluku Triwulan II Tahun 2018.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan Kajian Fiskal Regional Provinsi Maluku Triwulan II Tahun 2018. Softcopy telah dikirimkan ke alamat email ditpa@kemenkeu.go.id dan ditembuskan ke alamat lo.ditpa@gmail.com.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH PROVINSI MALUKU
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Sudarmanto
NIP. 196307221983111001

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL

Triwulan II
2018

Penyusun:
Penanggung Jawab: Sudarmanto II Ketua Tim: Dirgohaju Widodo Editor: Hermono I Desain Grafis: Kusumo Adi I Anggota: Dirgohaju W. I Bulus L.G I Anang R. I Robby P. I Jimmy P. |

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
Provinsi Maluku

DAFTAR ISI

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL ……. 1
A. Produk Domestik Regional Bruto……... 1
B. Inflasi ……. 2
C. Indikator Kesejahteraan……... 3
II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI PELAKSANAAN APBN……. 6
A. Pendapatan Negara……. 6
B. Belanja Negara…….. 9
C. Prognosis Realisasi APBN…….. 11
III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI PELAKSANAAN APBD……. 12
A. Pendapatan Daerah……. 13
B. Belanja Daerah…….. 17
C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2017…… 18
IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASI (APBD DAN APBD)……... 19
V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH…… 24
A. Meminimalkan Informasi Asimetri untuk mencegah Penyalahgunaan Dana Desa .....……... 24
B. Pengaruh Pilkada Serentak terhadap Perekonomian Maluku.....……. 25

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

A. Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan Ekonomi Maluku tercatat 5,47% pada triwulan II 2018

Perekonomian Maluku pada Triwulan II 2018 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp10,59 triliun. PDRB Maluku Triwulan II 2018 mampu tumbuh 5,47% (yoy) atau menurun dibanding triwulan II 2017 sebesar 5,75%, namun masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat nasional yang sebesar 5,27%.

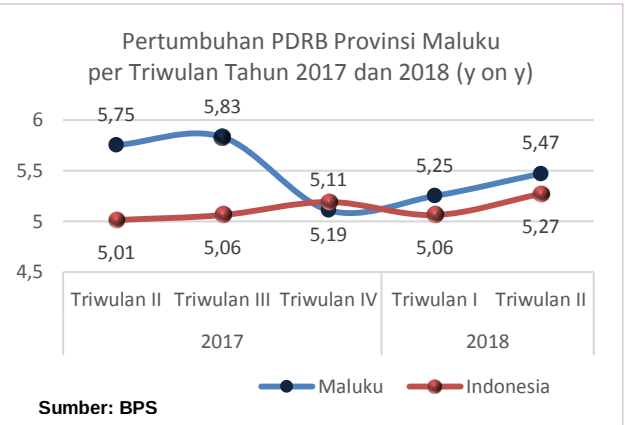

Sumber: BPS

Dari sisi Pengeluaran, Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2018 terjadi pada seluruh komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 10,42% diikuti komponen Impor Luar Negeri sebesar 9,61%, dan konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) yang tumbuh 9,37%. PMTB mampu tumbuh tinggi disebabkan oleh investasi yang masuk di Maluku seperti pembangunan Rumah Sakit International Siloam dan pembangunan Hotel Shantika. Impor yang tumbuh tinggi disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan bahan bakar untuk Hari Raya Idul Fitri. Sama halnya dengan LNPRT mampu tumbuh, yang disumbang oleh pengeluaran partai politik dalam menghadapi pilkada serentak.

Dari sisi lapangan usaha pertumbuhan didukung oleh hampir semua lapangan usaha kecuali pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi 9,40% Sementara pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 11,04%, diikuti oleh konstruksi sebesar 8,81%, dan Administrasi pemerintahan sebesar 7,89%. Bermunculannya industri pengolahan makanan dan minuman menjadi penyebab industri pengolahan mampu tumbuh tinggi, sementara tumbuhnya konstruksi salah satunya disebabkan oleh pembangunan rumah sakit Siloam dan Hotel Shantika. Administrasi pemerintahan tumbuh tinggi salah satunya disebabkan oleh pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Aparat Sipil Negara yang dibayar pada bulan Juni 2018. Peningkatan jumlah pembayaranTHR disebabkan karena perubahan unsur pembayaran dan penambahan Tunjangan Kinerja sebagai komponen THR.

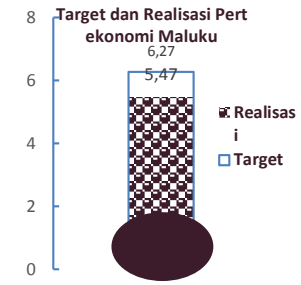

Sumber: BPS, KUAPPAS Pemda

Berdasarkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) tahun 2018, Provinsi Maluku mempunyai target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 6,27% - 6,77%, sementara realisasi TW II sebesar 5,47% atau dibawah target. Artinya sampai dengan triwulan II masih dibawah target sebesar 0,8%.

Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga dan ekspor menyebabkan pertumbuhan ekonomi kurang maksimal, karena hanya mampu tumbuh masing-masing 2,17% dan 0,40%. Untuk dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,27% pada tahun 2018 di Maluku, maka direkomendasikan sebagai berikut:

1. Memanfaatkan Dana Desa dengan program *cash for work* yang diharapkan mampu untuk menaikkan daya beli masyarakat.
2. Bantuan sosial yang tepat sasaran untuk meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirya dapat meningkatkan daya beli masyarakat
3. Peningkatan ekspor khususnya pada komoditi ikan dan udang dengan memanfaatan ekspor langsung ke luar negeri yang telah difasilitasi langsung dari pelabuhan di Ambon dan Tual dan Bandara Pattimura. Sebelumnya untuk ekspor di Maluku harus melalui pelabuhan dan Bandara diluar Maluku.

B. Inflasi

Laju Inflasi di Maluku pada triwulan II tahun 2018 masih terkendali

Inflasi di Provinsi Maluku diwakili oleh 2 kota yaitu Kota Ambon dan Kota Tual. Inflasi Maluku sampai dengan Juni 2018 (ytd) sebesar 2,50% lebih tinggi dari tingkat nasional sebesar 1,90%. Pada bulan Juni terjadi inflasi sebesar 1,05% juga lebih tinggi dari tingkat nasional yang mengalami inflasi sebesar 0,59%.

Tingkat Inflasi (*mtm*)
Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2018

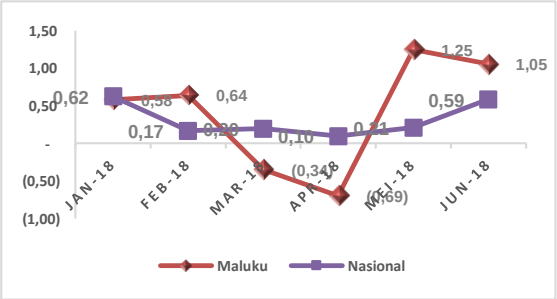

Sumber: BPS, BI

Tingkat Inflasi (*ytd*)
Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2018

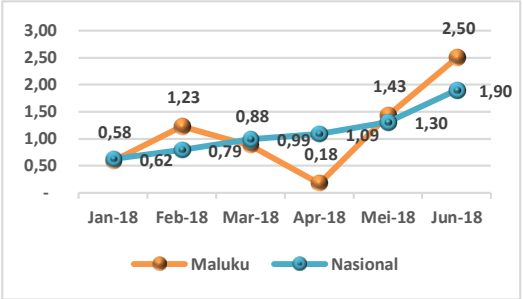

Sumber: BPS, BI

Kota Ambon dan Kota Tual yang mewakili Maluku mengalami Inflasi karena bahan makanan dan transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan

Kota Ambon pada bulan Juni 2018 mengalami Inflasi 0,94%. Semua kelompok pengeluaran memberikan andil inflasi di Kota Ambon terutama bahan makanan sebesar 0,50% dan transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 3,89%. Kota Tual pada bulan Juni mengalami Inflasi sebesar 2,22%. Sama

Seperti pada Kota Ambon, semua kelompok pengeluaran memberikan andil inflasi di Kota Tual ini terutama bahan makanan sebesar 4,18% dan transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 3,81%.

Dari data di atas, bahan makanan dan transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan merupakan penyumbang inflasi terbesar dikarenakan permintaan atas keduanya yang mengalami peningkatan signifikan akibat memasuki bulan puasa dan hari raya idul fitri. Meskipun pada bulan juni mengalami inflasi yang lumayan tinggi namun secara tahun kalender inflasi di Maluku masih cukup terkendali.

Target Inflasi di Provinsi Maluku sesuai dengan dokumen KUA tahun 2018 sebesar 3,25-3,75%. Dari target tersebut, realisasi inflasi s.d Juni 2018 (ytd) sebesar 2,5%. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi di Provinsi Maluku masih terjaga.

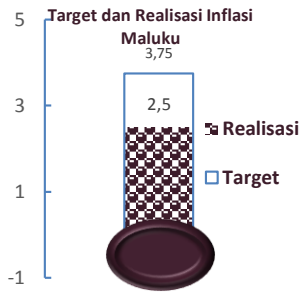

Untuk menjaga tingkat inflasi, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan pemda harus memperhatikan ketersediaan 2 kelompok penyumbang inflasi yaitu bahan makanan dan transpor. Khusus bahan makanan perlu diwaspadai terkait dengan kondisi cuaca yang kurang bersahabat dan juga mendekati hari raya natal dan tahun baru pada triwulan IV. Beberapa rekomendasi yang diberikan kepada TPID antara lain: mengatur *stock* barang khususnya bahan makanan terutama ikan akibat cuaca yang kurang bersahabat, memperlancar arus distribusi barang dengan memanfaatkan Tol laut, membangun konektivitas antar daerah di wilayah Maluku dengan memanfaatkan berbagai moda transportasi (kapal laut dan pesawat udara), memperbanyak kerja sama dengan penyedia moda transportasi khususnya pada hari-hari besar keagamaan.

C. Indikator Kesejahteraan

Indikator Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan (gini rasio) dan tingkat pengangguran terbuka pada suatu daerah.

1. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Maluku pada Maret 2018 sebesar 18,12% terendah dalam lima tahun terakhir

Tingkat Kemiskinan di Provinsi Maluku pada Maret 2018 sebesar 18,12% merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir. Tingkat Kemiskinan menunjukkan trend yang semakin menurun dari waktu ke waktu kecuali periode September 2014 s.d maret 2015 dan Maret 2016 s.d September 2016. Apabila dibandingkan antara periode Maret 2018 ke September 2017 penduduk miskin Maluku mengalami penurunan 340 orang atau mengalami penurunan sebesar 0,17% dari 18,29% menjadi 18,12%. secara geografis terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di perkotaan sebanyak 1.940 orang yang semula 47.830 orang menjadi 45.890 orang, sementara jumlah penduduk miskin dipedesaan meningkat 1.600 orang semula 272.590 orang menjadi 274.190 orang.

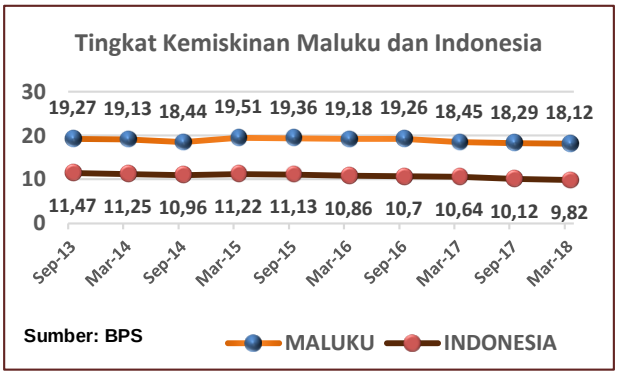

Bila dibandingkan dengan nasional, kemiskinan di Maluku sangat tertinggal jauh. Pada Maret 2018 tingkat kemiskinan Maluku sebesar 18,12%, lebih tinggi dari tingkat nasional yang telah mencapai satu digit yaitu sebesar 9,82%. Penyebab kemiskinan di Maluku antara lain karena perekonomian Maluku masih mengandalkan APBN dan APBD sebagai pendorong utama, infrastruktur yang belum memadai, konektivitas antar pulau yang belum baik; tingkat pendidikan yang rendah, dan investasi yang rendah. Sementara dana desa belum dapat berkontribusi untuk menekan kemiskinan dengan melihat indikator penduduk miskin di desa yang mengalami kenaikan 1.600 orang pada Maret 2018.

2. Gini Ratio

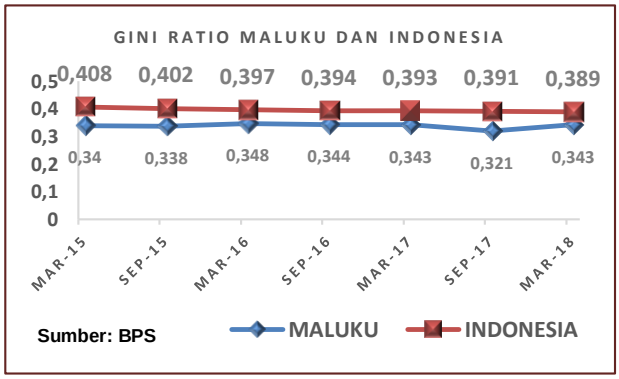

Gini ratio Maluku per Maret 2018 sebesar 0,343, meningkat 0,022 dibandingkan per September 2018

Pada Maret 2018 tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Maluku yang diukur dengan gini ratio tercatat 0,343. Angka ini meningkat 0,022 poin jika dibandingkan dengan September 2017 yang sebesar 0,321. Meskipun meningkat namun masih lebih baik dari tingkat nasional sebesar 0,389. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk di wilayah Maluku lebih merata dibandingkan dengan tingkat nasional.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perbaikan gini ratio di Wilayah Maluku adalah sebagai berikut:

1. Kenaikan pengeluaran perkapita per bulan penduduk kelompok menengah 40% meningkat lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok 20% teratas, serta belum maksimalnya pengeluaran kelompok 40% terendah.
2. Belum maksimalnya pengeluaran kelompok terendah tidak terlepas belum mulainya kegiatan yang bersifat padat karya dan bantuan sosial pada awal tahun 2018.

3. Ketenagakerjaan

Pengangguran di Propinsi Maluku pada Februari 2018 tercatat menurun

Pada Februari 2018, dari 1.187.642 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Maluku, sebanyak 772.174 orang diantaranya merupakan angkatan kerja. Dari 772.174 angkatan kerja, 56.958 orang diantaranya masih dalam posisi menganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 7,77% (Februari 2017) menjadi 7,38% (Februari 2018).

Perkembangan Komposisi Tenaga Kerja Maluku

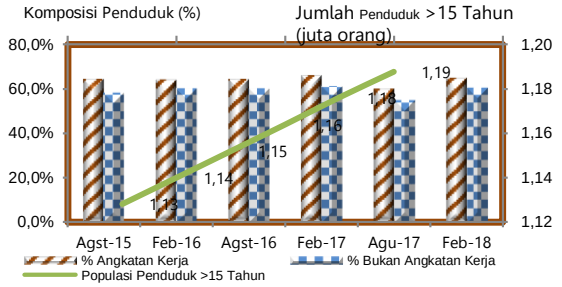

Sumber: BPS

Tingkat Pengangguran Terbuka Maluku dan Nasional

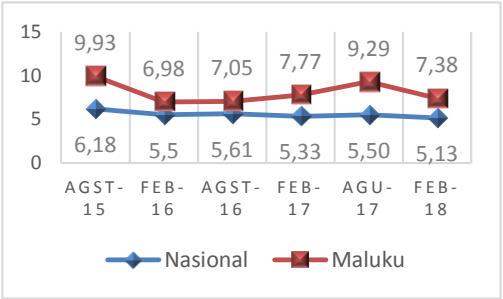

Sumber: BPS

Pada bulan Februari 2018 TPT Maluku lebih tinggi dari tingkat nasional sebesar 5,13%. Penurunan tingkat pengangguran disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang mulai meningkat akibat pilkada serentak pada 2 Kabupaten/Kota dan 1 Provinsi. Selain itu program *cash for work* dana desa yang mulai disalurkan pada bulan Januari 2018 turut andil dalam mengatasi pengangguran di Maluku.

Target dan realisasi indikator kesejahteraan Provinsi Maluku Tahun 2018

Tingkat Kemiskinan

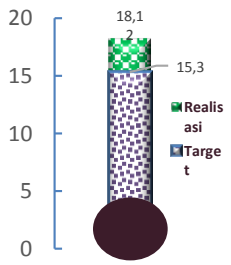

Tingkat Pengangguran

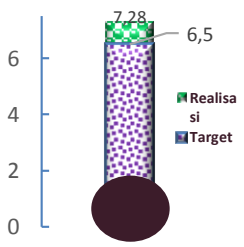

Gini Ratio

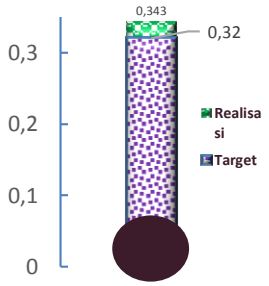

Realisasi indikator kesejahteraan di Maluku sampai dengan triwulan II, yang berupa tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan gini ratio belum ada yang memenuhi target yang ditetapkan dalam KUA 2018. Berdasarkan permasalahan yang ada dalam tiap-tiap indikator kesejahteraan direkomendasikan kepada Pemda sebagai berikut:

1. Segera direalisasikan dana APBN dan APBD belanja yang menyentuh langsung kepada masyarakat seperti dana desa, bantuan sosial (Rastra, KIP, PKH), bantuan pemerintah dan proyek-proyek infrastruktur.
2. Memanfaatkan program *cash for work* dalam penggunaan dana desa
3. Mendorong investasi di wilayah Maluku dengan cara menawarkan kemudahan-kemudahan kepada investor untuk mengolah sumber daya alam dan mempercepat proses pengelolaan Blok Masela.

II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Realisasi Pendapatan tumbuh 9,74%, sama halnya dengan Belanja yang meningkat 2,05%

Realisasi Pendapatan APBN di Provinsi Maluku sampai dengan triwulan II tahun 2018, mencapai Rp771,33 miliar tumbuh 9,74% dari triwulan II tahun 2017. Sementara Realisasi belanja sebesar Rp8.862,12 miliar meningkat 2,05% dari triwulan II tahun 2017. Sehingga sampai akhir triwulan II tahun 2018 terjadi defisit sebesar Rp8.090,79 miliar meningkat 1,37% dari triwulan II tahun 2017.

Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Maluku s.d. Akhir Triwulan II Tahun 2017 dan Tahun 2018

(dalam miliar Rp)

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
A. PENDAPATAN NEGARA	2.398,57	702,88	2.150,33	771,34
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	2.398,57	702,88	2.150,33	771,04
1. Penerimaan Pajak	2.259,25	564,25	1.991,83	610,13
2. PNBP	139,32	138,63	158,50	160,91
II. PENERIMAAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL	-	-	-	0,30
III. HIBAH	-	-	-	-
B. BELANJA NEGARA	20.301,64	8.683,98	20.567,78	8.862,12
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	7.455,57	2.387,06	8.057,75	2.578,97
1. Belanja Pegawai	2.583,12	1.117,10	2.641,51	1.227,19
2. Belanja Barang	2.655,76	742,70	3.168,38	843,92
3. Belanja Modal	2.197,18	527,13	2.232,92	503,69
4. Belanja Bantuan Sosial	19,51	0,13	14,94	4,17
II. TRANSFER KE DAERAH	11.884,47	5.814,33	11.546,54	5.708,48
1. Dana Perimbangan	11.589,45	5.655,55	11.438,04	5.654,23
a. Dana Transfer Umum	8.346,12	4.647,90	8.251,22	4.743,68
1) Dana Bagi Hasil	623,21	165,32	292,53	104,62
2) Dana Alokasi Umum	7.722,91	4.482,58	7.958,69	4.639,06
b. Dana Transfer Khusus	3.243,33	1.007,65	3.186,82	910,56
1) DAK Fisik	2.032,02	518,80	1.867,54	251,48
2) DAK Non Fisik	1.211,31	488,85	1.319,27	659,08
2. Dana Insentif Daerah (DID)	295,02	158,78	108,50	54,25
3. Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
III. DANA DESA	961,60	482,59	963,49	574,67
C. SURPLUS/DEFISIT	(17.903,07)	(7.981,10)	(18.417,45)	(8.090,78)

Sumber: OMSPAN, Simtrada (diolah)

A. Pendapatan Negara

Pendapatan Negara di Provinsi Maluku sampai dengan triwulan II tahun 2018, mencapai Rp771,33 miliar tumbuh 9,74% dari triwulan II tahun 2017 yang sebesar Rp702,88 miliar. Tumbuhnya pendapatan ini disumbang oleh meningkatnya Penerimaan Pajak sebesar 8,13% dan Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar 16,07%.

1. Penerimaan Perpajakan

Pendapatan pajak mampu tumbuh 8,13% atau 14,26% apabila tanpa tax amnesty

Sampai dengan akhir triwulan II 2018, realisasi pendapatan pajak sebesar Rp610,13 milyar, atau tumbuh 8,13% dibanding triwulan II tahun 2017 yang sebesar 564,25 miliar. Apabila pendapatan *tax amnesty* pada tahun 2017 sebesar Rp30,27 milyar dikeluarkan, maka

pendapatan pajak tumbuh 14,26%. Tumbuhnya pendapatan pajak ini dipengaruhi oleh Pajak Penghasilan (PPh) yang mampu tumbuh 4,25% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mampu tumbuh 12,56%.

a) Pajak Penghasilan (PPh)

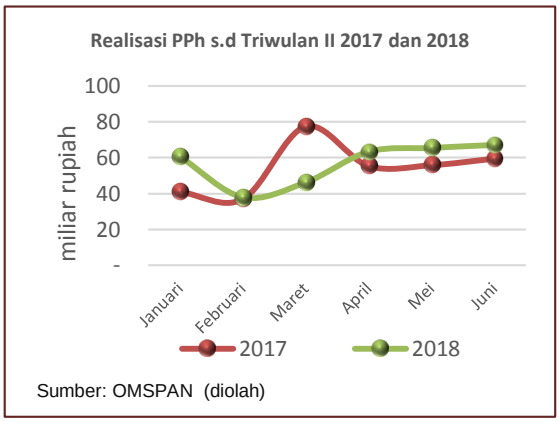

Pajak Penghasilan mampu tumbuh 4,25%

Realisasi PPh triwulan II tahun 2018 sebesar Rp339,98 miliar tumbuh 4,25% dari triwulan II tahun 2017 yang sebesar Rp326,11 miliar. Penerimaan PPh didominasi di Kota Ambon disusul Kabupaten MTB dan Kabupaten Maluku Tengah. Tumbuhnya pajak penghasilan ini salah satunya disebabkan oleh naiknya penghasilan ASN dari penerimaan THR yang memperhitungkan tunjangan kinerja.

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

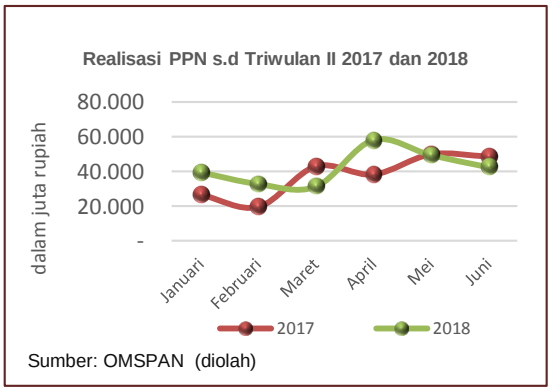

PPN mampu tumbuh secara signifikan sebesar 12,56%

Realisasi PPN di Provinsi Maluku dalam triwulan II 2018 sebesar Rp253,74 miliar, atau tumbuh 12,56% dibanding dengan penerimaan triwulan II tahun 2017.. Tumbuhnya PPN ini disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang tinggi yang memasuki bulan Puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Selain itu meningkatnya investasi yang didukung oleh tumbuhnya PMTB yang cukup signifikan pada triwulan II sebesar 10,42%.

c) Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

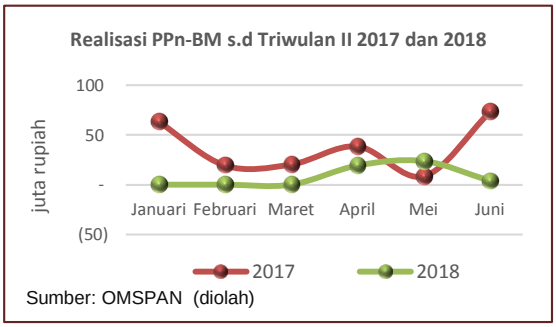

PPnBM mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar 79,16%

Realisasi penerimaan PPnBM di Maluku sampai dengan triwulan II tahun 2018 sebesar Rp46,66 juta mengalami penurunan 79,16% dari triwulan II tahun 2017 yang sebesar Rp223,99 juta.

Kondisi ini mengindikasikan sampai triwulan II tahun 2018 konsumsi barang yang termasuk dalam kategori barang mewah di Maluku semakin mengecil.

d) Penerimaan Cukai

Penerimaan Cukai mampu tumbuh secara signifikan sebesar 14,94%

Realisasi penerimaan Cukai di Provinsi Maluku sampai dengan triwulan II 2018 sebesar Rp0,12 miliar atau tumbuh 14,94% dibanding penerimaan sampai dengan triwulan II tahun 2017 sebesar Rp0,10 miliar. Penerimaan Cukai berasal dari Kota Ambon sebagai pintu gerbang utama lalu lintas perdagangan Provinsi Maluku.

Sumber: OMSPAN (diolah)

Meskipun penerimaan pajak mampu tumbuh 8,13% pada triwulan II 2018, namun realisasi penerimaan pajak tersebut baru tercapai sebesar 30,63% dari target yang ditetapkan. Untuk dapat memenuhi target yang ditetapkan maka direkomendasikan :

1. Mengingat profil perpajakan di Maluku kurang lebih 40% disumbangkan oleh potongan APBN dan APBD, maka aparat pajak dapat bekerjasama dengan Pengelola Keuangan APBN dan APBD untuk mematuhi kewajiban perpajakan,
2. Melakukan ekstensifikasi ke pusat-pusat ekonomi di luar kota Ambon yang belum tersentuh oleh aparat pajak.
3. Menggali potensi perpajakan dari dana desa yang jumlahnya 963 milyar di tahun 2018.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan PNBP mampu tumbuh signifikan sebesar 16,07%

Sampai dengan akhir triwulan II 2018, realisasi PNBP mencapai Rp160,9 miliar, tumbuh 16,07% dibanding triwulan II tahun 2017 yang sebesar Rp138,63 miliar. Realisasi PNBP ini dipengaruhi oleh tumbuhnya Pendapatan jasa sebesar 36,21%, pengelolaan BMN 6,41% dan PNBP lainnya 25,98%. Sementara PNBP Pendidikan mengalami penurunan 0,75%.

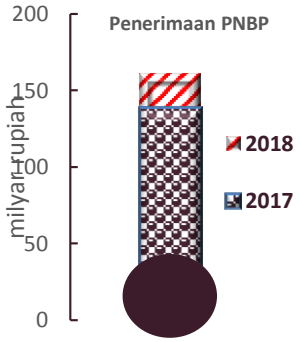

Sumber: OMSPAN (diolah)

a) PNBP Pendidikan

Penerimaan PNBP mampu tumbuh signifikan sebesar 16,07%

Realisasi PNBP Pendidikan sampai dengan triwulan II 2018 sebesar Rp64,59 miliar, atau turun 0,75% dibanding

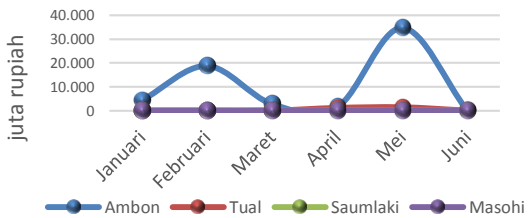

Sumber: OMSPAN (diolah)

triwulan II tahun 2017 yang sebesar Rp65,08 miliar. Tidak adanya kenaikan uang kuliah dan jumlah mahasiswa pada sektor pendidikan di wilayah Maluku mengakibatkan penerimaan PNBP Pendidikan stagnan.

b) PNBP Jasa

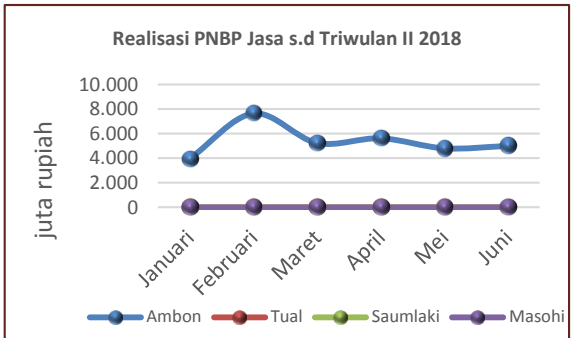

Sumber: OMSPAN (diolah)

PNBP jasa mampu tumbuh sangat signifikan sebesar 36,21%

Realisasi PNBP Jasa sampai dengan triwulan II 2018 sebesar Rp61,53 miliar tumbuh 36,21% dari triwulan II 2017 yang sebesar Rp45,17 miliar. Tumbuhnya PNBP jasa disebabkan oleh naiknya jasa transportasi terutama dari *airport tax* bandara yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan akibat dari peningkatan penumpang yang signifikan. Begitu halnya dengan jasa kesehatan yang ikut andil memberikan pertumbuhan pada penerimaan PNBP yang berasal dari rumah sakit tentara di Kota Ambon.

PNBP yang dapat berkembang di Provinsi Maluku adalah PNBP Jasa yang berupa transportasi dan kesehatan, sementara PNBP pendidikan peningkatannya tergantung dengan jumlah mahasiswa dan biaya kuliah. Untuk itu peningkatan pelayanan kesehatan dan transportasi perlu ditingkatkan kembali seiring dengan naiknya PNBP.

B. Belanja Negara

Belanja Negara sampai dengan triwulan II 2018 sebesar Rp8,86 triliun, meningkat 2,05% dibanding dengan triwulan II 2017 sebesar Rp8.68 triliun. Meningkatnya belanja negara ini disumbang oleh Belanja Pemerintah Pusat yang meningkat 8,04% dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengalami penurunan 0,02%.

1. Belanja Pemerintah Pusat

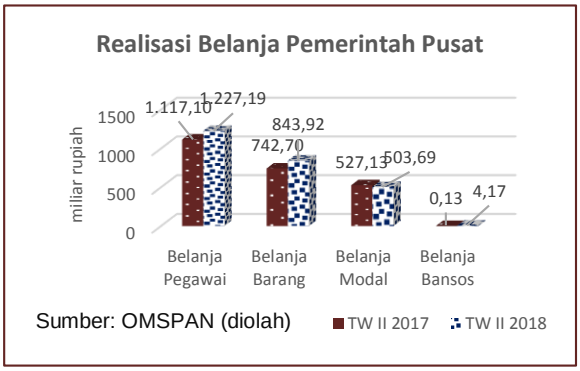

Sumber: OMSPAN (diolah)

Realisasi Belanja pegawai meningkat 9,85%, belanja barang meningkat 13,98%, sementara belanja modal mengalami penurunan 4,45%

Belanja pemerintah pusat disumbang oleh Belanja pegawai yang meningkat 9,85%. Peningkatan ini disebabkan oleh pembayaran THR pada bulan Juni 2018

yang mencakup tunjangan kinerja. Realisasi belanja barang juga meningkat 13,63% yang disebabkan oleh persiapan pilkada serentak. Begitu juga dengan belanja bantuan sosial yang meningkat 3.108,75%. Sementara Realisasi Belanja modal mengalami penurunan sebesar 4,45% disebabkan oleh terlambatnya pengadaan barang dan jasa.

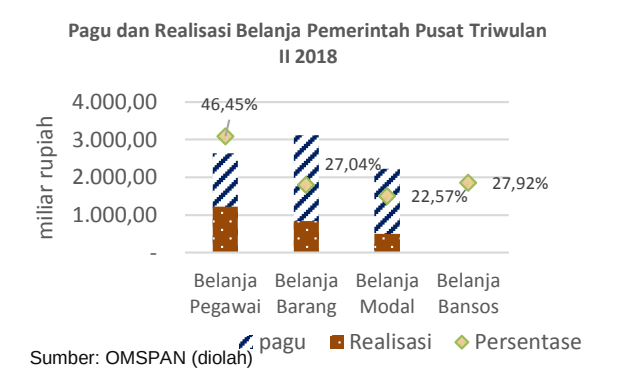

Sumber: OMSPAN (diolah)

Apabila dilihat persentase realisasinya, belanja pegawai 46,45%, belanja barang 27,04%, belanja modal 22,57% dan belanja bantuan sosial 27,92%. Persentase total belanja pemerintah pusat sebesar 32,20% atau masih dibawah dari target nasional triwulan II sebesar 40%. Mengingat pertumbuhan ekonomi di Maluku sangat tergantung dari pengeluaran APBN, maka rendahnya persentase tersebut perlu menjadi perhatian khusus untuk lebih ditingkatkan terutama untuk belanja barang dan belanja modal yang dapat mengungkit perekonomian Maluku.

Meskipun secara realisasi belanja pemerintah pusat triwulan II 2018 mengalami peningkatan dari triwulan II 2017, namun secara persentase masih rendah untuk itu direkomendasikan kepada satuan kerja untuk dapat meningkatkan realisasinya terutama belanja barang dan modal yang akan dapat menjadi pengungkit perekonomian di Maluku.

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

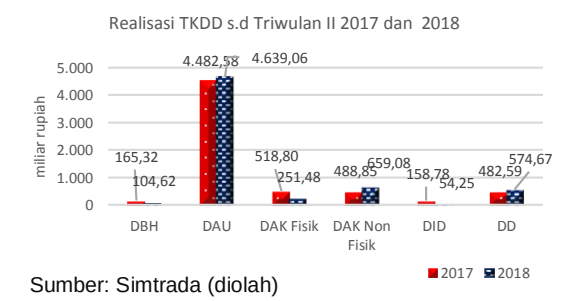

Sumber: Simtrada (diolah)

Realisasi DAU, DAK Non Fisik dan Dana desa mengalami peningkatan masing-masing 3,49%, 34,82%, dan 19,08%, semantara DAK Fisik, dan DBH mengalami penurunan masing-masing 51,53% dan 36,72%.

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa disumbang oleh Dana Alokasi Umum yang meningkat 3,49% yang disebabkan oleh naiknya pagu pada 2018 karena tedapat perubahan kebijakan adanya tambahan alokasi affirmasi pada beberapa pemda. DAK Non Fisik meningkat 34,82% disebabkan oleh tertibnya pemda dalam memenuhi persayaratan penyaluran. Dana Desa meningkat 19,08% karena dana desa sampai dengan tahap II telah disalurkan semuanya. Sementara DAK Fisik turun 51,53% disebabkan oleh perubahan kebijakan penyaluran dari 4 tahap menjadi 3 tahap, dimana tahap I persyaratan penyaluran

mengharuskan rencana kontrak yang disetujui oleh K/L dan telah adanya daftar kontrak. Dana Bagi Hasil juga mengalami penurunan sebesar 36,72% disebabkan terlambatnya mekanisme perhitungan data lifting minyak, periode lifting dan penetapan daerah terkait.

3. Manajemen Investasi Pusat

Pinjaman Provinsi Maluku masih dalam proses debt swap dan PDAM Kota Ambon masih menunggu proses penghapusan

Daftar Penerusan Pinjaman di Provinsi Maluku Tahun 2018

No	Nomor Perjanjian	Hak Tagih Pemerintah	Status
Pemerintah Provinsi Maluku			
1	RDI-358/DP3/1999	Rp59.017.326.533,02	*Proses Debt swap*
2	PRJ-139B/MK.11/1983	Rp10.000.030,00	*Proses Debt swap*
3	AMA-155/PRJ-139B	Rp0,00	Lunas
4	AMA-164/RDI-358/2012	Rp0,00	Lunas
PDAM Kota Ambon			
1	SLA-12/029/IBRD/PP	Rp0,00	Lunas
2	12/029/IBRD/PP	Rp589.182.554,00	Proses Penghapusan

Terdapat 4 Pinjaman Provinsi Maluku melalui penerusan pinjaman. 2 pinjaman merupakan hasil restrukturisasi telah lunas sejak 2017, sementara 2 pinjaman yang merupakan induk perjanjian masih dalam proses *debt swap*. Begitu halnya dengan Pinjaman Kota Ambon terdapat 2 perjanjian, yang satu telah lunas yang dan satu masih dalam proses penghapusan.

C. Prognosis Realisasi APBN

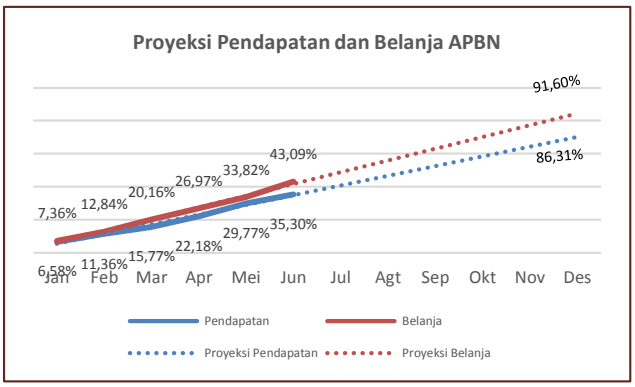

Realisasi pendapatan negara sampai dengan akhir tahun 2018 diperkirakan 86,31%, sementara belanja negara diperkirakan 91,60%

Meskipun penerimaan perpajakan sampai triwulan II tumbuh signifikan, mengingat target yang cukup besar diperkirakan pendapatan sampai akhir 2018 hanya akan mencapai 86,31%. Adanya efisiensi dan penghematan alamiah dari sisa kontrak diperkirakan belanja sampai dengan triwulan IV akan mencapai 91,60%.

Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Maluku s.d. Triwulan IV Tahun 2018 dalam jutaan rupiah

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan II		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV	
		Rp	% Realisasi thd Pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi thd Pagu
Pendapatan Negara	2.150,33	771,34	35,87%	1.855,94	86,31%
Belanja Negara	20.567.78	8.862,12	43,19%	18.795,93	91.60%
Surplus/Defisit	-18.417,45	-8.090,78	44,05%	-16.939,99	91,97%

Sumber: Kanwil DJPB Promal

III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Wilayah Maluku terdiri atas dua belas Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agregat seluruh Pemda (Provinsi/Kabupaten/Kota) dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku
s.d. Akhir Triwulan II Tahun 2017 dan Tahun 2018

(dalam miliar Rp)

Uraian	2017		2018	
	Pagu	Realisasi	pagu	Realisasi
Pendapatan	13.446,74	6.591,86	14.308,47	6.284,90
PAD	1.025,94	331,91	1.473,35	331,88
Pendapatan Pajak Daerah	488,71	196,99	548,46	198,16
Pendapatan Retribusi	208,76	67,78	218,03	64,44
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	67,28	0,20	50,00	0,10
Lain-Lain PAD yang sah	261,19	66,93	656,86	69,17
Pendapatan Transfer	12.244,27	6.118,82	12.601,26	5.862,13
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	10.926,60	5.175,74	11.468,56	5.369,05
Dana Bagi Hasil Pajak	239,48	116,16	323,06	99,98
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	63,66	12,72	-	-
Dana Alokasi Umum	7.781,05	4.349,17	7.958,69	4.431,61
Dana Alokasi Khusus	2.842,41	697,69	3.186,82	837,46
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	1.075,85	749,83	876,11	453,13
Dana Otonomi Khusus	76,29	251,58	-	-
Dana Penyesuaian	999,57	498,24	876,11	453,13
Transfer Pemerintah Provinsi	148,76	135,42	166,05	21,84
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	142,92	62,34	166,05	21,84
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5,83	73,08	-	-
Transfer Bantuan Keuangan	93,06	57,83	90,53	18,11
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Prov/Kab/Kota Lainnya	93,06	57,83	90,53	18,11
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	176,52	141,13	233,86	90,89
Pendapatan Hibah	150,65	125,90	233,86	89,80
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
pendapatan Lainnya	25,87	15,24	-	1,09
Jumlah Pendapatan	13.446,74	6.591,86	14.308,47	6.284,90
Belanja	12.999,59	3.782,53	13.156,80	4.072,93
Belanja Pegawai	4.763,94	1.715,02	4.690,43	1.929,52
Belanja Barang	3.382,30	873,21	3.820,52	958,38
Belanja Bunga	0,39	0,15	1,50	-
Belanja Subsidi	14,41	4,78	17,67	4,97
Belanja Hibah	728,64	381,26	917,96	612,71
Belanja Sosial	44,13	14,54	58,20	17,08
Belanja Bantuan Keuangan	709,08	210,66	-	-
Belanja Modal	3.290,72	566,57	3.589,96	530,16
Belanja Tak Terduga	65,99	16,34	60,56	20,11
Transfer Pemerintah Daerah	1.056,41	454,19	1.825,31	354,61
Transfer/Bagi Hasil ke Desa	238,68	97,44	42,52	15,50
Transfer bagi Hasil Pajak Daerah	237,93	97,44	42,52	15,50
Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya	0,75	-	-	-
Transfer bantuan Keuangan	817,73	356,76	1.782,80	339,11
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda lainnya	164,68	16,51	16,90	0,59
Transfer bantuan Keuangan ke Desa	652,31	340,19	1.765,63	338,52
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,74	0,06	0,26	-
Jumlah Belanja dan Transfer	14.056,00	4.236,72	14.982,11	4.427,53
Surplus/Defisit	(609,27)	2.355,14	(673,64)	1.857,36

Sumber: BPKAD/DPPKAD pemda lingkup Provinsi Maluku (diolah)

Realisasi Pendapatan APBD mengalami penurunan 4,66%

Capaian Pendapatan secara agregat sampai dengan akhir triwulan II tahun 2018 mencapai Rp6,28 triliun, mengalami penurunan 4,66% dari triwulan II 2017 yang sebesar Rp6,59 triliun. Penurunan realisasi pendapatan ini dipengaruhi oleh semua jenis pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar 0,01%, Pendapatan transfer mengalami penurunan 4,20%, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah mengalami penurunan 35,60%.

Realisasi Belanja dan Transfer mengalami kenaikan 4,50%

Capaian Belanja dan Transfer secara agregat sampai dengan akhir triwulan II tahun 2018 sebesar Rp4,42 triliun meningkat 4,50% dari triwulan II 2017 yang sebesar Rp4,34 triliun. Kenaikan realisasi belanja dan transfer ini dipengaruhi oleh Belanja Daerah yang meningkat 7,68% dan Transfer Pemerintah Daerah yang mengalami penurunan sebesar 21,93%.

A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

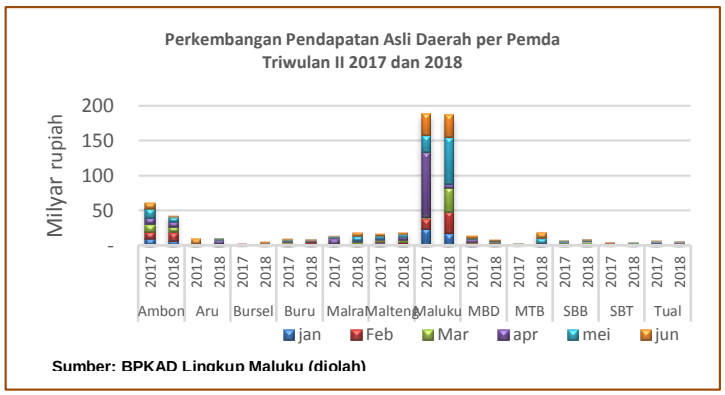

Sumber: BPKAD Lingkup Maluku (diolah)

Realisasi PAD Triwulan II masih stagnan

Secara agregat PAD Pemda lingkup Maluku sampai dengan akhir triwulan II tahun 2018 sebesar Rp331,88 miliar atau 22,53% dari pagu. Realisasi ini lebih rendah 0,01% dari triwulan II 2017. Realisasi PAD dipengaruhi oleh pendapatan pajak daerah yang mampu tumbuh 0,59% dan lain-lain pendapatan yang sah yang tumbuh 3,35%. Sedangkan retribusi daerah mengalami penurunan 4,92% dan Hasil Kakayaan Daerah yang dipisahkan juga mengalami penurunan 50%.

Apabila dilihat PAD pada pemerintah Daerah pada triwulan II 2018, terdapat 6 Pemerintah Daerah yaitu Kepulauan Aru, Buru Selatan, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, dan Maluku Tenggara Barat, yang mampu tumbuh apabila dibandingkan dengan triwulan II 2017. Untuk 6 Pemda yaitu Provinsi Maluku, Ambon, Buru, Maluku Barat Daya, Seram Bagian Timur dan Tual mengalami penurunan.

a. Penerimaan Pajak Daerah

Pajak Daerah mampu tumbuh tipis 0,59%

Agregat pajak daerah seluruh pemda di Maluku sampai dengan akhir triwulan II tahun 2018 sebesar Rp198,16 miliar atau 36,13% dari pagu, tumbuh 0,59% apabila dibandingkan dengan triwulan II 2017. Peningkatan pajak daerah ini disumbangkan oleh 11 Pemda yang mengalami kenaikan, dan satu Pemda yaitu kota Ambon yang mengalami penurunan.

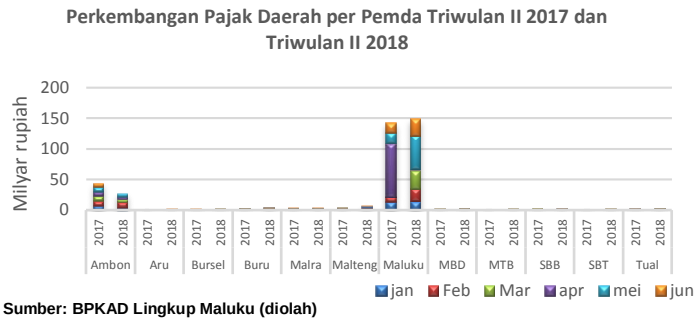

Sumber: BPKAD Lingkup Maluku (diolah)

Pajak Kendaraan bermotor, Pajak Hotel dan Pajak Restoran menjadi sumber pendapatan pada triwulan II tahun 2018. Hal ini disebabkan semakin bertambahnya kendaraan bermotor dan adanya beberapa acara tingkat nasional yang diselenggarakan di wilayah Maluku. Khusus di Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Barat Daya, pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami kenaikan yang sangat signifikan lebih dari 200%. Hal ini disebabkan pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan (perumahan) yang mulai gencar dilaksanakan.

b. Penerimaan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah mengalami penurunan 4,92 %

Agregat penerimaan retribusi seluruh pemda di Maluku sampai dengan akhir triwulan II 2018 sebesar Rp64,44 miliar atau 26,56% dari pagu, mengalami penurunan 4,92% apabila dibandingkan dengan triwulan II 2017. Retribusi daerah ini dipengaruhi oleh 5 Pemda yang mengalami kenaikan dan 7 Pemda yang mengalami penurunan.

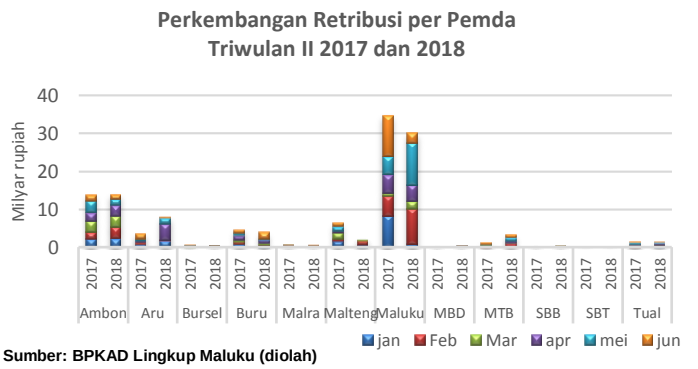

Sumber: BPKAD Lingkup Maluku (diolah)

Secara agregat, retribusi jasa umum (Retribusi sewa tanah dan bangunan, dan retribusi rekreasi) menjadi penyumbang penurunan pada triwulan II tahun 2018. Khusus Provinsi Maluku Retribusi pada triwulan II

2018 mengalami penurunan sampai 13,09%, hal ini disebabkan karena retribusi jasa usaha yang mengalami penurunan signifikan.

c. Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

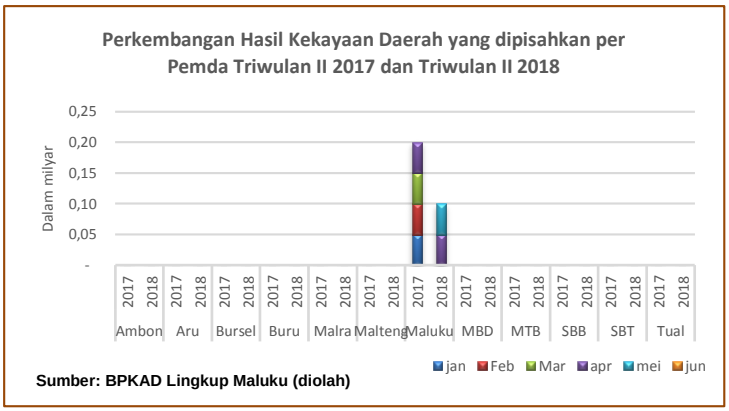

Sumber: BPKAD Lingkup Maluku (diolah)

Realisasi Hasil Kekayaan yang dipisahkan mengalami penurunan 50%

Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan seluruh pemda di Maluku sampai dengan akhir triwulan II tahun 2018 sebesar Rp100 juta atau 0,20% dari pagu, mengalami penurunan 50% dari triwulan II 2017. Realisasi tersebut berasal dari Provinsi Maluku berupa Deviden dari PT DOK dan perkapalan Wayame.

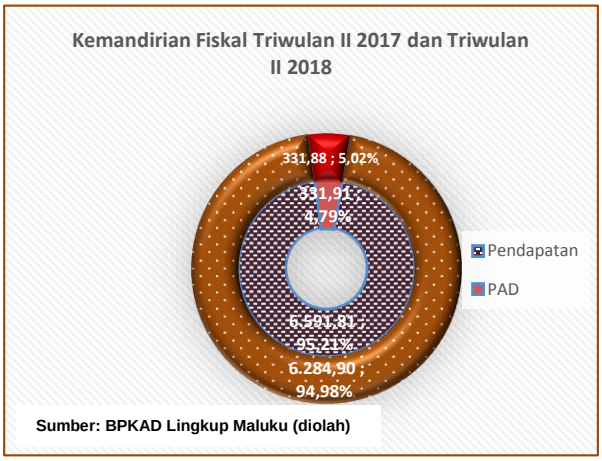

Sumber: BPKAD Lingkup Maluku (diolah)

Kemandirian Fiskal Maluku menunjukkan perbaikan dari 4,79% menjadi 5,02%

Kemandirian fiskal tercermin dari perbandingan antara PAD dengan total pendapatan. Perbandingan PAD dan Total Pendapatan Pemda di Maluku pada Triwulan II Tahun 2018 sebesar 5,02% atau naik dari triwulan II 2017 yang sebesar 4,79%. Ini menunjukkan bahwa meskipun masih rendah namun kemandirian fiskal pemda di Maluku telah menunjukkan perbaikan. Rendahnya PAD dikarenakan semua Pemda di Maluku belum sepenuhnya menggali secara maksimal sumber-sumber PAD nya. Kekayaan yang melimpah di Maluku tidak menjamin PAD yang diterima menjadi lebih baik. Infrastruktur yang masih kurang menjadi salah satu penyebab investor tidak mau menanamkan modalnya di Maluku.

Untuk dapat meningkatkan kemandirian fiskal, Pemda di Maluku harus dapat memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah dengan menarik investor-investor agar dapat menanamkan modalnya, yang diiringi dengan perbaikan infrrastruktur yang ada di Maluku.

2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer mengalami penurunan 4,92%

Total pendapatan transfer pada pemda lingkup Provinsi Maluku sampai dengan akhir triwulan II tahun 2018 sebesar Rp5,86 triliun atau 46,52% mengalami penurunan 4,20% dari Triwulan II 2017. Pendapatan transfer disumbangkan oleh Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebesar Rp5,36 triliun, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp453,13 miliar, Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp166,05 miliar dan transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp18,11 miliar.

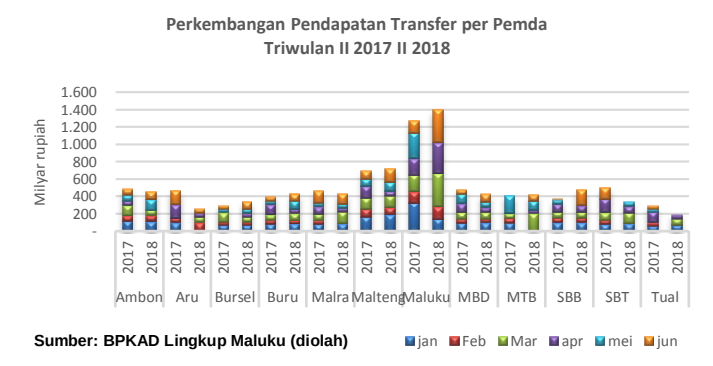

Sumber: BPKAD Lingkup Maluku (diolah)

Apabila dilihat dari 12 (dua belas) Pemerintah Daerah, terdapat 6 Pemda mengalami peningkatan dan 6 Pemda mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Triwulan II 2017. Sebanyak 6 Pemda yang mengalami penurunan dikarenakan belum disalurkannya DAK Fisik Tahap I dan adanya penundaan DAU karena pemda belum menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran pada SIKD. Sedangkan 6 pemda yang mengalami kenaikan dikarenakan semua jenis transfer telah tersalurkan tepat waktu.

Rekomendasi untuk pemerintah daerah terkait dengan Pendapatan Tranfer adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencegah terjadinya penundaan DAU, pemda harus menyampaikan laporan realisasi anggaran secara tepat waktu yaitu maksimal tanggal 20 setiap bulannya melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)..
2. Agar DAK Fisik dapat disalurkan, pemda harus segera menyampaikan dokumen persyaratan yaitu laporan penggunaan dana dan capaian output atas DAK Fisik tahun 2017, rencana kegiatan dan daftar kontrak secara tepat waktu.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

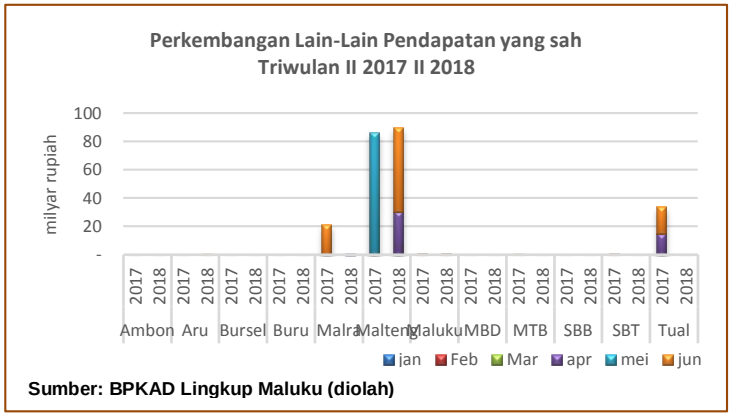

Sumber: BPKAD Lingkup Maluku (diolah)

Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan yang signifikan sebesar 35,60%

Secara agregat, realisasi lain-lain pendapatan yang sah pada pemda lingkup Provinsi Maluku sampai dengan akhir triwulan II 2018

sebesar Rp90,89 miliar atau mengalami penurunan 35,60% dibandingkan triwulan II 2017 yang sebesar Rp141,13 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya pendapatan jasa giro dan denda pajak.

B. Belanja Daerah

1. Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

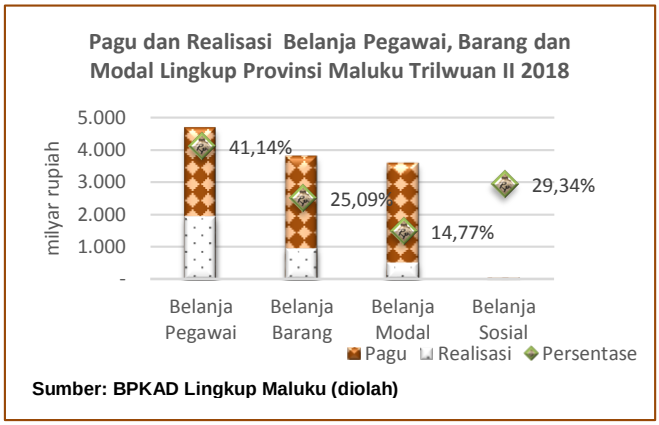

Belanja Pegawai dan Barang meningkat masing-masing 12,51% dan 9,75%, sementara belanja modal mengalami penurunan 6,43%

Realisasi Belanja pegawai pada pemda lingkup Provinsi Maluku sampai dengan akhir triwulan II tahun 2018 sebesar Rp1,92 triliun atau 41,14% dari pagu. Realisasi ini meningkat 12,51% dari triwulan II 2017. Realisasi Belanja Barang sebesar Rp958,38 miliar atau 25,09% dari pagu. Realisasi ini meningkat 9,75% dari triwulan II 2017. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp530,16 miliar atau 14,77% dari pagu atau turun 6,43% dari triwulan II 2017.

Meningkatnya Belanja Pegawai disumbang oleh pembayaran THR pada bulan Juni. Meningkatnya Belanja Barang dikarenakan dampak dari persiapan pelaksanaan pilkada serentak yang dilaksanakan pada bulan Juli. Turunnya Belanja Modal dipengaruhi oleh proses pengadaan barang dan jasa yang lambat dan terkendala oleh belum updatenya harga barang pada e-katalog.

2. Belanja Langsung dan Tidak Langsung

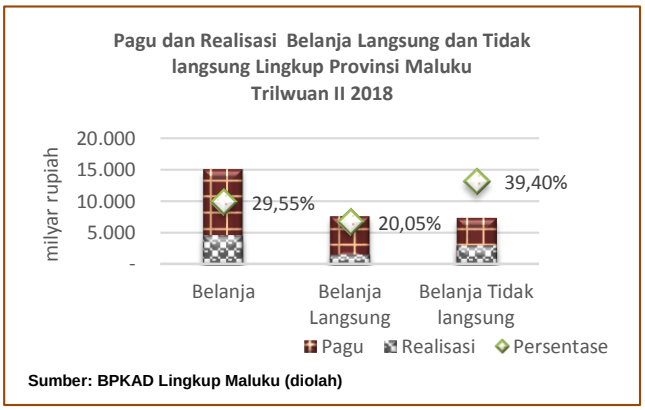

Realisasi belanja tidak langsung masih lebih dominan dengan realisasi 39,40% dibanding belanja langsung yang realisasinya 20,05%

Realisasi total Belanja pemda lingkup Provinsi Maluku sampai dengan akhir triwulan II tahun 2018 sebesar Rp4,07 triliun atau 30,96% dari pagu. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp1,52 triliun atau 20,05% dari pagu dan Belanja tidak langsung sebesar Rp2,89 triliun atau 39,40% dari pagu. Dengan melihat realisasi tersebut, belanja tidak langsung lebih dominan daripada belanja langsung. Dominannya belanja tidak langsung disebabkan karena belanja digunakan untuk pembayaran gaji

dan operasional kantor. Sedangkan realisasi belanja langsung masih rendah karena masih dalam proses pengadaan terutama untuk belanja modal.

Terkait dengan belanja daerah dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:
1. Proses pembayaran hak-hak ASN terutama gaji dan tunjangan diharapkan dapat dilakukan tepat waktu, dengan mempertimbangkan posisi kas pemda.
2. Proses pengadaan barang dan jasa agar dipercepat.
3. Segera melakukan koordinasi dengan LKPP terkait dengan pengadaan e-katalog yang barangnya belum tersedia.

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2018

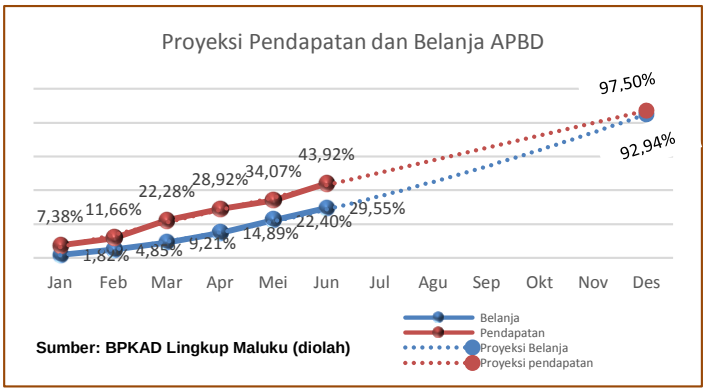

Sumber: BPKAD Lingkup Maluku (diolah)

Realisasi pendapatan sampai dengan triwulan IV 2018 diperkirakan mencapai 96,98%

Secara agregat, realisasi pendapatan APBD seluruh pemda di Provinsi Maluku sampai dengan akhir 2018 diperkirakan sebesar Rp13.950,95 miliar atau 97,50% dari target. Hal-hal yang diperkirakan tidak mencapai target adalah PAD dan dana transfer. Dengan melihat konsumsi rumah tangga yang mampu tumbuh 2,17% pada triwulan II 2018, maka PAD yang sumber utamanya dari pajak restoran dan hotel diperkirakan akan terealisasi 92,35% dari target. Sementara melihat kondisi keuangan APBN sampai dengan semester I yang cukup baik, dana transfer diperkirakan akan terealisasi 98,02%.

Tabel Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2018

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan II		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV	
		Rp	% thd pagu	Rp	% thd pagu
Pendapatan Daerah	14.308,47	6.284,47	43,92	13.950,95	97,50
Belanja Daerah	14.982,11	4.427,53	29,55	13.925,56	92,94
Surplus/Defisit	(673,64)	1.856,94	-	25,39	-

Realisasi belanja sampai dengan triwulan IV 2018 diperkirakan sampai dengan 92,94%.

Realisasi Belanja APBD agregat provinsi Maluku sampai dengan akhir tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp13.925,56 miliar atau 92,94% dari pagu. Penghematan alamiah dari sisa kontrak dan permasalahan pengadaan barang dan jasa menyebabkan belanja modal tidak akan terealisasi maksimal. Dari perkiraan pendapatan dan belanja tersebut, maka diproyeksikan pada akhir tahun 2018 akan terjadi surplus sebesar Rp25,39 miliar.

IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Pendapatan Pemerintah Konsolidasi mengalami penurunan 47,78%, sementara Belanja meningkat 5,75%

Pendapatan Pemerintah Konsolidasian Provinsi Maluku Triwulan II 2018 sebesar Rp773,08 miliar turun 47,78% dibandingkan dengan triwulan II 2017 sebesar Rp1.480,40 miliar, sementara Belanja Pemerintah Konsolidasian Provinsi Maluku Triwulan II sebesar Rp7.006,50 miliar meningkat 5,75% dibandingkan dengan triwulan II tahun 2017 sebesar Rp6.625,68 miliar. Turunnya pendapatan pemerintah konsolidasian secara signifikan dipengaruhi oleh turunnya transfer yang mencapai 238,27% dan Hibah yang turun 28,67%, sedangkan untuk pendapatan perpajakan mampu tumbuh sebesar 6,22% dan pendapatan bukan pajak mampu tumbuh sebesar 2,40%. Naiknya Belanja Konsolidasian dipengaruhi oleh meningkatnya Belanja Pemerintah sebesar 7,78% dan belanja transfer yang mengalami penurunan sebesar 21,93%.

Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian
Tingkat Wilayah Provinsi Maluku s.d. Triwulan II Tahun 2018
(dalam miliar Rupiah)

Uraian	2018			Kenaikan/	2017
	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Penurunan	Konsolidasi
Pendapatan Negara	**771,34**	**6.284,90**	**773,08**	**-47,78%**	**1.480,40**
Pendapatan Perpajakan	610,43	198,16	808,59	6,22%	761,25
Pendapatan Bukan Pajak	160,91	134,80	295,71	2,40%	288,78
Hibah	-	89,80	89,80	-28,67%	125,90
Transfer	-	5.862,13	(421,02)	-238,27%	304,48
Belanja Negara	**8.862,12**	**4.427,53**	**7.006,50**	**5,75%**	**6.625,68**
Belanja Pemerintah	2.578,97	4.072,93	6.651,90	7,78%	6.171,49
Transfer	6.283,16	354,61	354,61	-21,93%	454,19
Surplus/(defisit)	**(8.090,78)**	**1.857,36**	**(6.233,42)**	**21,15%**	**(5.145,28)**
Pembiayaan	**-**	**322,45**	**322,45**	**90,10%**	**169,62**
Penerimaan Pembiayaa Daerah	-	348,15	348,15	87,44%	185,74
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	25,70	25,70	59,45%	16,12
Sisa Lebih (kurang) pembiayaan anggaran	**(8.090,78)**	**2.179,81**	**(5.910,97)**	**18,80%**	**(4.975,66)**

Sumber: LKPK Kanwil DJPB Provinsi Maluku
Catatan: Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah untuk triwulan II 2018 sebesar Rp6.283,16 miliar

B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Porsi Pendapatan Perpajakan mengalami kenaikan 2,89%, sama halnya dengan pendapatan bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,20%

Dalam Pembentukan Pendapatan Pemerintah Konsolidasian, Porsi Pendapatan Perpajakan mengalami kenaikan sebesar 2,89% dari 64,74% pada triwulan II 2017 menjadi 67,72% pada

triwulan II 2018. Ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan pajak yang lebih besar dari jenis pendapatan yang lainnya.

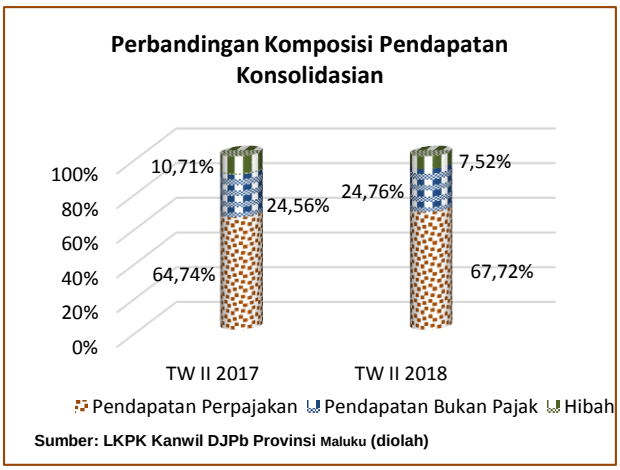

Porsi pendapatan bukan pajak juga mengalami kenaikan sebesar 0,20% dari 24,56 % pada triwulan II 2017 menjadi 24,76% pada triwulan II 2018. Kenaikan porsi ini dikarenakan meningkatnya PNBP yang lebih besar dari hibah namun lebih rendah dari pajak. Sementara untuk Hibah memiliki porsi yang menurun dari 10,71% pada triwulan II 2017 menjadi 7,52% pada triwulan II 2018, hal ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan hibah pada pemda yang mencapai 28,67%.

Porsi Pendapatan Perpajakan yang semakin besar mengindikasikan bahwa pendapatan Pemerintah Konsolidasian di Provinsi Maluku semakin membaik karena perpajakan merupakan sumber utama dari pendapatan. Diharapkan dengan naiknya porsi pendapatan perpajakan ini mampu meningkatkan kemandirian fiskal di provinsi Maluku.

2. **Analisis Perubahan**

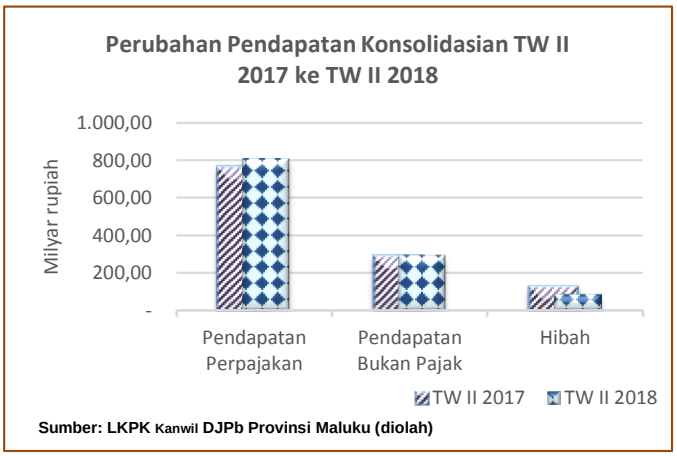

Realisasi Pendapatan perpajakan tumbuh 6,22%, sama halnya dengan pendapatan bukan pajak yang tumbuh 2,4%

Pendapatan perpajakan pada triwulan II tahun 2018 tumbuh 6,22% dibandingkan dengan triwulan II tahun 2017. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan pajak pusat yaitu tumbuhnya PPh sebesar 4,25% dan PPN tumbuh 12,56%. Pajak Daerah juga ikut andil dalam kenaikan dengan tumbuhnya Pajak Kendaraan bermotor, Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Sedangkan Pendapatan Bukan Pajak konsolidasian tumbuh 2,40% dipengaruhi oleh tumbuhnya PNBP pusat yang mencapai 16,07%. Tumbuhnya pendapatan perpajakan yang paling tinggi mengindikasikan pendapatan di Maluku semakin baik.

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap kenaikan realisasi pendapatan konsolidasian

Kenaikan/penurunan Pendapatan Perpajakan berbanding lurus dengan kenaikan/penurunan pertumbuhan ekonomi

Menurut BPS Provinsi Maluku porsi Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB di Provinsi Maluku berkisar antara 44% – 47%. Dari data tersebut dapat diambil hipotesis bahwa kenaikan/penurunan pendapatan akan berbanding lurus kenaikan/penurunan pertumbuhan ekonomi.

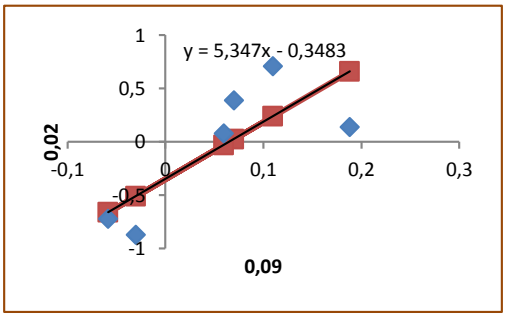

keterangan	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value
Intercept	-0,348254532	0,217021014	-1,6047	0,1838278
Pajak	5,347000641	2,162445872	2,472663	0,06875
Y = Pertumbuhan ekonomi				

Dari hasil analisis regresi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan positif signifikan dengan pendapatan perpajakan, yang artinya bahwa kenaikan/penurunan pendapatan perpajakan akan berbanding lurus dengan kenaikan/penurunan pertumbuhan ekonomi.

C. BELANJA KONSOLIDASIAN

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Porsi terbesar Belanja Pemerintah Konsolidasian adalah belanja pegawai sebesar 45,05% dan belanja barang 25,72%

Pada Triwulan II 2018 porsi belanja pegawai sebesar 45,05% mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan triwulan I 2017 yang sebesar 42,47%. Sementara belanja barang mengalami kenaikan dari 24,41% menjadi 25,72%, sementara Belanja modal mengalami penurunan dari 16,52 % menjadi 14,76%.

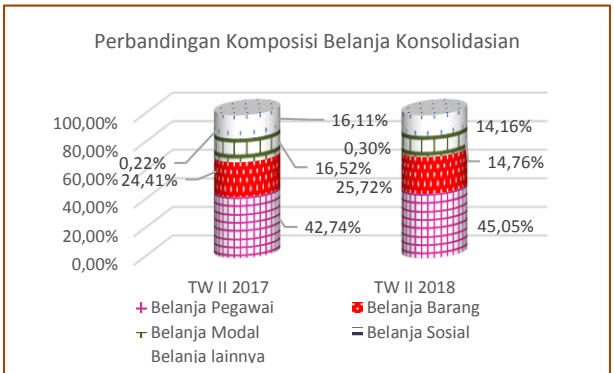

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Provinsi Maluku (diolah)

Dari uraian di atas, Kenaikan porsi belanja pegawai dan barang mengindikasikan belanja operasional masih mendominasi di Provinsi Maluku. Kenaikan Belanja pegawai disebabkan oleh pembayaran THR yang mencakup tunjangan kinerja. Naiknya Belanja barang disebabkan oleh persiapan pilkada serentak yang akan berlangsung pada bulan Juli. Belanja modal mengalami penurunan disebabkan oleh proses pengadaan barang dan jasa yang masih berlangsung.

2. Analisis Perubahan

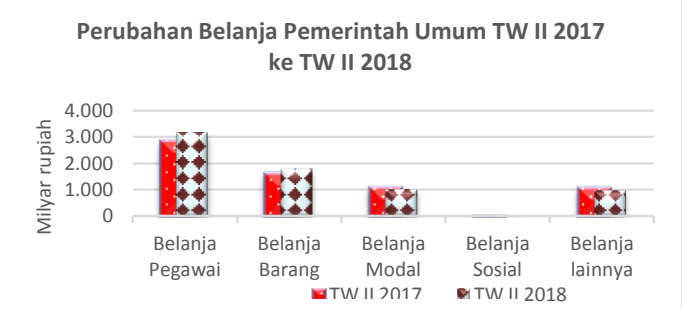

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Provinsi Maluku (diolah)

Realisasi Belanja pegawai, barang, dan bantuan sosial mengalami kenaikan masing-masing 11,48%, 11,42% dan 44,82%, sementara belanja modal mengalami penurunan sebesar 5,53%

Belanja Pemerintah Konsolidasian secara agregat pada triwulan I 2018 mengalami kenaikan 5,75% apabila dibandingkan dengan triwulan II 2017. kenaikan tersebut disumbangkan oleh Belanja pegawai yang mengalami kenaikan 11,48%, belanja barang mengalami kenaikan 11,42% dan belanja bantuan sosial mengalami kenaikan 44,82%, dan belanja modal mengalami penurunan 5,53%. Kenaikan Belanja pegawai dan belanja barang diharapkan mampu mendorong perekonomian Maluku dari sisi kenaikan konsumsi pemerintah.

3. Analisis dampak kebijakan fiskal kepada indikator ekonomi regional

Rasio Belanja Konsolidasian terhadap Jumlah Penduduk mengalami kenaikan, berbanding terbalik dengan tingkat kemiskinan

Rasio Belanja Konsolidasian terhadap jumlah penduduk pada triwulan II 2018 sebesar Rp3,95 juta lebih tinggi dari triwulan II 2017 sebesar Rp3,79 juta. Semakin naiknya rasio ini mengindikasikan bahwa jumlah manfaat yang diterima oleh masyarakat Maluku terhadap belanja APBN dan APBD semakin meningkat.

	TW II 2017	TW II 2018
Belanja Konsolidasian	6.625.683.012.951	7.006.501.320.286
Jumlah Penduduk Maluku	1.744.654	1.773.776
Rasio	3.797.706	3.950.048

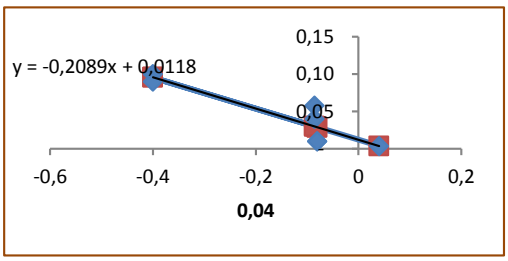

Keterangan	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value
Intercept	0,011823761	0,009507348	1,243644	0,2687581
Belanja	-0,208908034	0,042588178	-4,90531	0,0044539
Y = Tingkat Kemiskinan				

Dari hasil analisis regresi dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan mempunyai hubungan signifikan negatif terhadap Belanja, yang artinya bahwa peningkatan belanja konsolidasian akan berbanding terbalik dengan tingkat kemiskinan. Hasil ini menguatkan bahwa manfaat yang diterima masyarakat Maluku terhadap belanja APBN dan APBD yang semakin meningkat akan berdampak menurunnya tingkat kemiskinan.

D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Dari data laporan operasional, dapat dianalisis kontribusi pemerintah dalam PDRB.

	TW II 2018	PDRB sd tw II	% atas PDRB
Revenue	6.922,35	20.866,43	33,17%
Expenses	7.547,88		36,17%
Gross operating balance	(625,53)		2,99%
Net acquisition of non financial assets	116,59		0,55%
Net lending/borrowing	(742.12)		-3,55%

Sampai dengan Triwulan II 2018 net lending/borrowing sebesar -3,55%, berarti provinsi Maluku tidak mampu mendanai belanja dari pendapatan yang diterima

N*et lending/borrowing* terhadap PDRB Provinsi Maluku sebesar -3,55%, Artinya pendapatan yang diterima di Maluku pada triwulan II 2018 belum mampu membiayai seluruh belanja. Hal ini dipengaruhi oleh penerimaan perpajakan dan pendapatan bukan pajak pusat yang belum mampu menutup belanja, sementara pendapatan daerah masih tergantung dengan dana transfer pemerintah pusat. Ini mengindikasikan perekonomi di Maluku sangat dipengaruhi oleh dana transfer dari pemerintah pusat.

Apabila dianalisis lebih lanjut dengan rumus perbandingan dengan PDRB maka kontribusi Pemerintah secara spesifik dapat disajikan sebagai berikut:

1. Kontribusi belanja Pemerintah terhadap PDRB

Konsumsi Pemerintah	7,547,88
PDRB	20.866,43
Kontribusi	36,17%

Kontribusi pemerintah dalam PDRB di Provinsi Maluku sebesar 36,17% menunjukkan bahwa APBN dan APBD di provinsi Maluku menjadi stimulus fiskal yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk itu percepatan realisasi APBN dan APBD yang proposional diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Kontribusi investasi Pemerintah terhadap PDRB adalah

PMTB	116,59
PDRB	20.866,43
Kontribusi	0,0055

Perbandingan *net acquisition of financial asset* dibagi dengan PDRB di Provinsi Maluku sebesar 0,55%. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah pada triwulan II 2018 berkontribusi 0,55% terhadap PDRB. Rendahnya kontribusi belanja modal terhadap PDRB dikarenakan pada triwulan II 2018 belanja modal masih rendah yang dikarenakan masih berlangsungnya proses pengadaan barang dan jasa.

V. BERITA/ISU FIKAL REGIONAL TERPILIH

A. Meminimalkan Informasi Asimetri Untuk Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa

Keterbukaan Informasi, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan program cash for work dan penilaian pertanggungjawaban oleh masyarakat, dapat meminimalkan asimetri informasi

Pengelolaan Dana Desa di Maluku masih jauh dari kata sempurna. Hal ini terlihat dari indikator terdapat lima desa atau negeri yang diproses hukum karena terjadi penyimpangan. Untuk mengatasi masalah penyimpangan perlu adanya sistem Pengelolaan dana desa yang mampu untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Salah satu cara mengatasinya dapat dilakukan melalui pengawasan melekat dengan cara meminimalkan informasi asimetri.

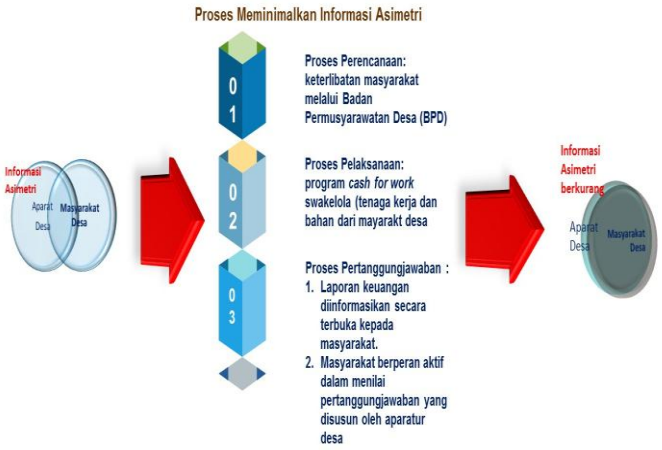

Informasi asimetri dapat timbul karena adanya masalah agensi. Masalah agensi timbul karena adanya konflik kepentingan antara agen (aparat desa) dan prinsipal (masyarakat), karena tidak bertemunya utilitas yang maksimal antara mereka. Meminimalkan informasi asimetri untuk mencegah penyimpangan pengelolaan dana desa harus dilakukan dalam setiap tahap siklus anggaran yaitu mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa meminimalkan asimetri informasi untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan:

1. Adanya keterbukaan informasi dari aparatur desa kepada masyarakat desa dari proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.
2. Keterlibatan masyarakat secara langsung melalui musyawarah dalam proses penyusunan APBDes.
3. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam penggunaan dana desa melalui program *cash for work* yang mengedepankan bahan baku dan tenaga kerja berasal dari masyarakat desa.
4. Keterlibatan masyarakat dalam menilai pertanggungjawaban aparatur desa yang telah disusunnya.

B. Pengaruh Pilkada Serentak Terhadap Perekonomian Maluku

Proses pilkada serentak di Maluku mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1%

Pada triwulan I tahun 2017 dan triwulan II tahun 2018 Maluku melaksanakan pemilihan walikota/bupati dan gubernur. Terhadap dua kali pilkada serentak tersebut bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian Maluku? Darmin Nasution (tempo.co.id) dan Teddy Oetomo (tribunews.com) menyatakan bahwa pilkada serentak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

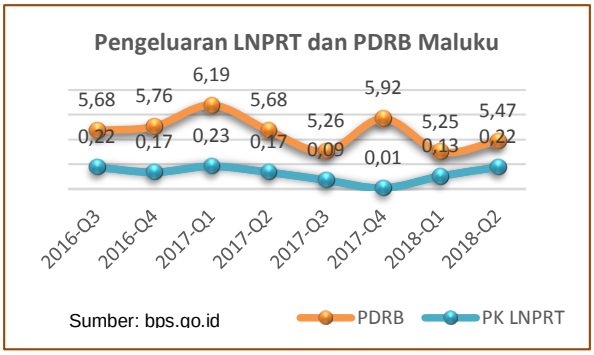

Proses pilkada serentak akan mendorong pengeluaran konsumsi yang berasal dari partai politik dan pemerintah (KPU, Bawaslu, Polri). Pengeluaran konsumsi partai politik akan lebih berpeluang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi konsumsi partai politik dikelompokkan sebagai pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT).

Pada triwulan I tahun 2017 perekonomian maluku tumbuh 6,19% yang disumbang salah satunya oleh LNPRT sebesar 0,23%, demikian juga pada triwulan II tahun 2018 dimana pertumbuhan sebesar 5,47% disumbang LNPRT sebesar 0,22%. Sementara tanpa adanya pilkada serentak sumbangan PK-LNPRT rata-rata sebesar 0,1%. Sehubungan dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pilkada serentak di Maluku mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1%. Penyelenggaraan pilkada serentak tersebut dapat menjadi rujukan bahwa penyelenggaraan acara dengan memanfaatkan potensi yang ada di Maluku kiranya akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Terkait dengan upaya memacu pertumbuhan ekonomi di Maluku, dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan mampu mempromosikan Maluku sebagai tempat penyelenggaraan acara baik yang berskala nasional maupun internasional yang diharapkan akan membawa peningkatan pertumbuhan ekonomi
2. Pemerintah daerah perlu memperkuat pelaku usaha di Maluku sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan event secara mandiri
3. Pemerintah Daerah perlu menginisiasi event di daerah dan memberikan back-up secara menyeluruh untuk menarik pengunjung dari luar daerah sehingga dapat dipastikan adanya aliran uang masuk ke Provinsi Maluku.

www.cnbcindonesia.com
www.tempo.co.id
www.kontan.co.id
www.tribunnews.com

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI MALUKU
Jl. Pitu Ina Karang Panjang No.7 Karang Panjang Ambon 97134 Kotak Pos 1199
Telepon (0911)354428, 354430, 354434, Fax (0911) 314757
Email csw.maluku@kemenkeu.go.id